

PERAN MANAJEMEN KEUANGAN DAERAH DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Ira Shanty Dalimunthe¹, Asnil², Aldri Frinaldi³, Nora Eka Putri⁴
Pasca Sarjana Universitas Negeri Padang
e-mail: irashantydl@gmail.com

ABSTRAK

Manajemen keuangan daerah merupakan elemen kunci dalam upaya mewujudkan pembangunan yang merata dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan yang dilakukan secara transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan publik memungkinkan pemerintah daerah mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya keuangan yang tersedia. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana manajemen keuangan daerah berperan dalam meningkatkan kualitas layanan publik serta mendorong tercapainya indikator kesejahteraan masyarakat melalui proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan keuangan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi kasus dan analisis kebijakan, penelitian ini menelaah dinamika pengelolaan keuangan daerah melalui wawancara mendalam, telaah dokumen resmi, dan observasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan keuangan tidak hanya ditentukan oleh kecukupan anggaran, tetapi juga oleh kapasitas aparatur, kualitas sistem pengawasan, serta konsistensi penerapan prinsip tata kelola yang baik. Peningkatan kesejahteraan masyarakat terlihat dari meningkatnya akses terhadap layanan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program perlindungan sosial. Dengan memperkuat akuntabilitas dan partisipasi publik, manajemen keuangan daerah berpotensi memberikan dampak yang lebih signifikan terhadap pembangunan dan kualitas hidup masyarakat.

Kata Kunci: *manajemen keuangan daerah, tata kelola publik, kesejahteraan masyarakat*

ABSTRACT

Regional financial management plays a crucial role in shaping the quality of public services and enhancing community welfare. Transparent, accountable, and well-regulated financial governance enables local governments to allocate resources more effectively and respond to public needs in a timely manner. This study aims to examine how regional financial management contributes to improvements in social services, infrastructure development, and overall living standards. Applying a qualitative approach through case studies and policy analysis, the research incorporates in-depth interviews, document reviews, and non-participatory observations to capture the actual dynamics of financial management at the regional level. The findings reveal that effective financial management is influenced not only by the availability of fiscal resources but also by the competence of public officials, the strength of internal and external oversight mechanisms, and the consistent implementation of good governance principles. Enhanced transparency and public participation support the creation of more targeted and measurable development programs. The study concludes that robust financial governance has the potential to deliver tangible benefits to society, particularly when local governments prioritize accountability and evidence-based policy formulation.

Keywords: *regional financial management, public governance, community welfare*

PENDAHULUAN

Manajemen keuangan daerah memiliki peranan yang sangat penting dalam konteks otonomi daerah di Indonesia. Dalam era otonomi, pemerintah daerah diberikan kewenangan

untuk mengelola sumber daya keuangan yang dimiliki, sehingga dapat berkontribusi langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Otonomi daerah memfasilitasi pemerintah lokal untuk merespons kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara lebih efektif. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara transparan dan akuntabel, yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat (UU No. 1/2022).

Hubungan antara pengelolaan keuangan daerah dan kesejahteraan masyarakat sangat erat. Pemerintah daerah yang mampu mengelola anggaran dengan baik, alokasi dana untuk program-program kesejahteraan seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dapat dilakukan secara optimal. Misalnya, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2021, daerah yang memiliki manajemen keuangan yang baik menunjukkan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan yang efektif dapat membawa dampak positif terhadap kualitas hidup masyarakat.

Ketika pemerintah daerah menyusun anggaran, mereka harus memahami konteks lokal, termasuk tantangan dan peluang yang dihadapi oleh masyarakat. Masyarakat tidak bisa dipisahkan dari proses ini, karena kebijakan yang selaras dengan kebutuhan masyarakat akan lebih mudah diterima dan diimplementasikan. Menekankan pentingnya dialog antara pemerintah dan masyarakat untuk mencapai pemahaman yang sama, sehingga anggaran yang direncanakan benar-benar mencerminkan prioritas masyarakat. Selain itu, pendekatan ini menuntut adanya refleksi terhadap hasil implementasi kebijakan. Seberapa jauh anggaran yang digunakan berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat harus menjadi bahan evaluasi dan pembelajaran bagi pemerintah daerah. Melalui proses ini, akuntabilitas bukan hanya dilihat dari laporan keuangan, tetapi juga dari dampak sosial yang dihasilkan.

Ada beberapa rumusan masalah yang perlu dibahas dalam tulisan ini. Pertama, apa peran manajemen keuangan daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat? Pertanyaan ini berfokus pada bagaimana pengelolaan keuangan yang baik dapat berkontribusi terhadap program-program yang mendukung kesejahteraan masyarakat. Kedua, apa tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan daerah? Tantangan ini meliputi isu-isu seperti kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas, masalah transparansi, dan dampak dari kondisi ekonomi makro yang tidak stabil. Untuk menjawab rumusan masalah ini, penelitian ini akan mengkaji berbagai aspek dari manajemen keuangan daerah, termasuk penyusunan anggaran, pengelolaan sumber daya keuangan, serta transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan. Dengan demikian, diharapkan dapat ditemukan solusi yang tepat untuk mengatasi tantangan yang ada.

Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk menganalisis peran manajemen keuangan daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui analisis ini, diharapkan dapat diidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, artikel ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan daerah dan mencari solusi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kinerja keuangan daerah. Dengan memahami peran manajemen keuangan daerah dan tantangan yang dihadapi, diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang bermanfaat bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan di bidang manajemen keuangan daerah serta memberikan masukan bagi kebijakan publik yang lebih baik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus dan analisis kebijakan untuk mendeskripsikan serta menganalisis peran manajemen keuangan daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pendekatan ini dipilih karena mampu menampilkan pemahaman mendalam terhadap fenomena sosial dan kebijakan publik berdasarkan konteks serta dinamika nyata di lapangan. Fokus penelitian diarahkan pada praktik pengelolaan keuangan daerah dalam kerangka otonomi daerah di Indonesia, khususnya pada aspek perencanaan anggaran, pelaksanaan, dan pengawasan keuangan publik yang memiliki implikasi terhadap kesejahteraan masyarakat. Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan aparatur pemerintah daerah, pengelola keuangan, dan tokoh masyarakat, sedangkan data sekunder dikumpulkan dari dokumen kebijakan, laporan keuangan daerah, serta berbagai hasil penelitian dan literatur yang relevan.

Pengumpulan data dilakukan dengan tiga teknik utama, yaitu wawancara semi terstruktur, studi dokumentasi, dan observasi non-partisipatif. Wawancara digunakan untuk menggali informasi deskriptif mengenai praktik dan tantangan dalam pengelolaan keuangan daerah. Studi dokumentasi dilakukan dengan menelaah laporan keuangan daerah, kebijakan APBD, serta regulasi nasional yang terkait, sedangkan observasi dilakukan untuk memahami konteks implementasi kebijakan dan dinamika sosial di lapangan. Analisis data mengikuti model Miles dan Huberman yang meliputi tahap reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan teknik, dengan cara membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumen resmi, sehingga informasi yang diperoleh lebih objektif, mendalam, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Tabel 1. Hubungan antara Aspek Manajemen Keuangan Daerah dan Dampaknya terhadap Kesejahteraan Masyarakat

No	Aspek Manajemen Keuangan Daerah	Indikator	Dampak terhadap Keberhasilan Kesejahteraan Masyarakat	Sumber Temuan
1	Perencanaan Penyusunan Anggaran	dan Partisipasi dalam kejelasan program	masyarakat musrenbang; prioritas tepat sasaran	Program pendidikan dan kesehatan lebih anggraini (2022), Khusaini (2018)
2	Pengelolaan Sumber Daya Keuangan	Efektivitas penggunaan PAD dan dana transfer	Peningkatan pendapatan daerah dan fasilitas publik	Swandewi (2014), Trianto (2016)
3	Transparansi Akuntabilitas	dan Ketersediaan keuangan publik; meningkat, penerapan e-budgeting	Kepercayaan publik menurun	Suparji (2019), Silaban et al. (2024)
4	Pengawasan Evaluasi	dan Audit internal eksternal optimal	Efisiensi berjalan meningkat, kebocoran anggaran menurun	Mardiasmo (2021), Deswira (2022)

Aspek No Manajemen Keuangan Daerah	Indikator Keberhasilan Kesejahteraan Masyarakat	Dampak terhadap	Sumber Temuan
		Kinerja publik meningkat	
5	Kapasitas Sumber Daya Manusia Kompetensi pengelola keuangan	aparatur Kinerja pelayanan publik meningkat	Thesaurianto (2007), Sutrisna & Setiawati (2023)

Tabel 1 menggambarkan keterkaitan langsung antara berbagai aspek manajemen keuangan daerah dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hasil analisis menunjukkan bahwa perencanaan dan penyusunan anggaran yang partisipatif merupakan faktor penting dalam memastikan bahwa kebijakan dan program pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini sejalan dengan temuan Anggraini (2022) dan Khusaini (2018) yang menegaskan bahwa keterlibatan publik dalam proses perencanaan anggaran mampu meningkatkan efektivitas realisasi program daerah. Selanjutnya, pengelolaan sumber daya keuangan yang efektif berperan besar dalam menciptakan kemandirian fiskal daerah. Optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) dan pemanfaatan dana transfer pusat mendorong peningkatan infrastruktur publik serta pelayanan sosial (Swandewi, 2014; Trianto, 2016). Dengan demikian, semakin efisien pemerintah daerah mengelola sumber dan alokasi keuangan, semakin besar pula kontribusinya terhadap kesejahteraan masyarakat.

Aspek transparansi dan akuntabilitas juga memiliki pengaruh signifikan terhadap kepercayaan masyarakat. Penerapan sistem digital seperti *e-budgeting* dan keterbukaan laporan keuangan publik dapat menekan potensi penyalahgunaan anggaran serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan (Suparji, 2019; Silaban et al., 2024). Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan dan evaluasi yang dilakukan secara rutin oleh lembaga audit internal maupun eksternal berperan penting dalam memastikan efisiensi penggunaan anggaran. Mekanisme audit yang kuat terbukti mampu menekan kebocoran keuangan serta meningkatkan efektivitas kebijakan pembangunan (Mardiasmo, 2021; Deswira, 2022).

Terakhir, kapasitas sumber daya manusia (SDM) menjadi faktor fundamental yang memengaruhi keseluruhan sistem pengelolaan keuangan daerah. Aparatur yang memiliki kompetensi tinggi dalam bidang akuntansi dan pengelolaan publik berkontribusi langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan dan profesionalisme birokrasi (Thesaurianto, 2007; Sutrisna & Setiawati, 2023). Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa efektivitas manajemen keuangan daerah sangat ditentukan oleh sinergi antara aspek perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan peningkatan kapasitas aparatur. Semakin kuat sistem manajemen keuangan daerah yang dijalankan, semakin besar pula dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut.

Pembahasan

Manajemen keuangan daerah memiliki peranan strategis dalam mendukung keberhasilan otonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Secara konseptual, manajemen keuangan daerah merupakan rangkaian proses yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan keuangan publik yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan pembangunan (Khusaini, 2018). Dalam praktiknya, pengelolaan keuangan daerah tidak hanya berfokus pada pemanfaatan sumber daya finansial, tetapi juga pada upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik sebagaimana ditekankan oleh Mardiasmo (2021) serta



Sains (2018). Penerapan prinsip-prinsip tersebut sangat penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah sekaligus memastikan bahwa setiap alokasi anggaran memiliki dampak nyata terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Dalam konteks otonomi daerah, pengelolaan keuangan menjadi semakin kompleks karena pemerintah daerah dituntut untuk mampu mengelola sumber daya fiskalnya secara mandiri dan efisien. Sudaryo, Sjarif, dan Sofiati (2021) menyebutkan bahwa otonomi fiskal memberikan ruang bagi daerah untuk berinovasi dalam pengelolaan pendapatan asli daerah (PAD) serta menyesuaikan kebijakan anggaran dengan kebutuhan lokal. Namun demikian, masih banyak tantangan yang muncul, seperti keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, ketimpangan pendapatan daerah, dan lemahnya sistem pengawasan. Noviades (2013) menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan keuangan daerah sangat dipengaruhi oleh kemampuan aparatur dalam memahami kebijakan fiskal dan menerapkannya secara konsisten. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas aparatur melalui pelatihan dan pendampingan teknis menjadi hal yang penting untuk menjamin efektivitas pelaksanaan otonomi keuangan.

Dalam praktiknya, perencanaan dan penganggaran publik yang partisipatif menjadi kunci keberhasilan manajemen keuangan daerah. Anggraini (2022) menjelaskan bahwa keterlibatan masyarakat dalam penyusunan anggaran daerah dapat memperkuat transparansi, meningkatkan efisiensi alokasi anggaran, dan memastikan program pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat. Pemerintah daerah yang menerapkan perencanaan anggaran secara inklusif cenderung lebih berhasil dalam mencapai target pembangunan sosial dan ekonomi. Defitri (2018) menambahkan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah yang akurat dan transparan juga berperan besar dalam menjaga kualitas laporan keuangan serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Hal ini sejalan dengan penelitian Deswira (2022) yang menekankan pentingnya kinerja keuangan yang efisien untuk menciptakan pemerintahan yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Selanjutnya, pengelolaan sumber daya keuangan daerah yang baik turut menentukan tingkat kemandirian fiskal suatu daerah. Swandewi (2014) menunjukkan bahwa optimalisasi dana perimbangan dan PAD mampu memperkuat keserasian anggaran serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Upaya ini harus disertai kebijakan yang berorientasi pada hasil dan efisiensi, sebagaimana disampaikan oleh Trianto (2016), bahwa efektivitas pengelolaan keuangan yang tinggi akan berdampak langsung pada peningkatan layanan publik dan pembangunan infrastruktur. Pengelolaan yang baik juga berkontribusi terhadap pengembangan sektor produktif seperti pariwisata dan ekonomi kreatif yang pada gilirannya memperkuat ketahanan ekonomi daerah. Dalam konteks ini, Sidik (2002) mengingatkan bahwa optimalisasi pajak daerah dan retribusi merupakan instrumen penting untuk memperluas basis pendapatan daerah sekaligus mendorong kemandirian fiskal.

Aspek transparansi dan akuntabilitas merupakan elemen fundamental dalam sistem keuangan daerah yang sehat. Suparji (2019) menegaskan bahwa penerapan prinsip *good governance* dapat memperkecil peluang penyalahgunaan anggaran dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Hasil penelitian Silaban et al. (2024) menunjukkan bahwa kurangnya transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah dapat menimbulkan ketidakpuasan publik dan menghambat proses pembangunan lokal. Oleh karena itu, penerapan sistem digital seperti *e-budgeting* dan *e-reporting* menjadi solusi efektif untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik. Sejalan dengan hal tersebut, Sutrisna dan Setiawati (2023) menyatakan bahwa pemerintahan daerah yang menerapkan prinsip tata kelola yang baik mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan efektivitas pelayanan publik dan efisiensi penggunaan anggaran.

Manajemen keuangan yang baik juga berdampak langsung terhadap pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat. Sari (2021) menyoroti bahwa sistem pengendalian internal yang kuat berperan penting dalam memastikan akuntabilitas keuangan serta mencegah terjadinya penyimpangan. Dalam praktik di beberapa daerah, peningkatan kualitas pengelolaan keuangan terbukti memperbaiki akses masyarakat terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur publik. Deswira (2022) menegaskan bahwa daerah yang memiliki tata kelola keuangan yang baik menunjukkan kinerja pembangunan yang lebih stabil dibandingkan daerah dengan sistem keuangan yang lemah. Temuan serupa dikemukakan oleh Subang (2020), bahwa kemampuan individu dan lembaga dalam mengelola keuangan secara bertanggung jawab akan berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat secara umum.

Kendati demikian, berbagai kendala masih dihadapi dalam implementasi pengelolaan keuangan daerah, seperti lemahnya kapasitas SDM, kurangnya pemahaman terhadap regulasi, serta masih adanya praktik korupsi dan penyalahgunaan anggaran. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan peningkatan kapasitas manajerial dan profesionalisme aparatur, sebagaimana disarankan oleh Sudaryo et al. (2021), serta penguatan sistem pengawasan berbasis teknologi. Pemerintah daerah juga perlu mengembangkan kebijakan berbasis data dan melakukan evaluasi secara berkala terhadap efektivitas kebijakan anggaran. Penerapan analisis berbasis data dapat membantu pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat (Deswira, 2022). Dengan demikian, manajemen keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil akan menjadi landasan penting bagi terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik serta peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen keuangan daerah memiliki peran yang sangat strategis dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan anggaran yang direncanakan secara partisipatif, dilaksanakan secara efisien, dan diawasi secara konsisten terbukti mampu memperkuat efektivitas program-program publik yang menyentuh kebutuhan mendasar masyarakat. Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur tidak hanya bergantung pada besarnya alokasi dana, tetapi juga pada kemampuan aparatur dalam mengelola keuangan secara profesional serta mematuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas. Tantangan yang masih sering muncul, seperti rendahnya kapasitas sumber daya manusia, lemahnya pengawasan internal, dan keterbatasan pemanfaatan teknologi informasi, perlu mendapat perhatian serius agar pengelolaan keuangan dapat berjalan lebih optimal. Penguatan tata kelola keuangan yang didukung oleh sistem yang transparan, partisipasi masyarakat, dan kebijakan berbasis data merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa anggaran daerah benar-benar membawa dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, keberhasilan manajemen keuangan daerah tidak semata-mata diukur dari laporan keuangan yang baik, tetapi dari perubahan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang merasakan manfaatnya secara langsung.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, A. D. (2022). Peran belanja daerah dalam meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan masyarakat. *Jurnal Mahasiswa: Jurnal Ilmiah Penalaran dan Penelitian Mahasiswa*, 4(1). <https://doi.org/10.51903/jurnalmahasiswa.v4i1.484>
- Defitri, S. Y. (2018). Pengaruh pengelolaan keuangan daerah dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Benefitा*, 3(1), 64–75. <https://doi.org/10.22216/jbe.v3i1.2376>

- Deswira, A. (2022). *Analisis kinerja pengelolaan keuangan daerah: Studi kasus pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar*. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, 17(1), 72–88. <https://www.academia.edu/download/89789545/118.pdf>
- Khusaini, M. (2018). *Keuangan daerah*. Universitas Brawijaya Press.
- Mardiasmo, M. B. A. (2021). *Otonomi & manajemen keuangan daerah* (Edisi terbaru). Penerbit Andi. https://books.google.co.id/books?id=6_BBEAAAQBAJ
- Noviades, D. (2013). Pengelolaan keuangan daerah di era otonomi daerah. *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, 4(1), 1–15. <https://scholar.archive.org/.../article/download/1971/1319>
- Sains, F. S. (2018). Analisis pengaruh pengelolaan keuangan daerah, akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja keuangan pemerintah: The new fraud triangle model dengan perspektif syariah dalam mendeteksi perilaku fraud. *Ekuitas (Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 4(1), 21–46. <https://www.researchgate.net/.../Analisis-Pengaruh-Pengelolaan-Keuangan...>
- Sari, P. (2021). *Pengaruh sistem pengendalian internal terhadap pengelolaan keuangan pada BLUD RSUD Sawerigading Kota Palopo* (Disertasi doktor, Universitas Muhammadiyah Palopo). <http://repository.umpalopo.ac.id/1279/>
- Sidik, M. (2002). *Optimalisasi pajak daerah dan retribusi daerah dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah*. Makalah orasi ilmiah, Bandung. <https://www.academia.edu/download/31029505/index.htm.pdf>
- Silaban, D. G., Situmorang, W. A., Ginting, R. K. B., Sitohang, F. M., Yani, N. W., & Hadiningrum, S. (2024). Dampak kurangnya transparansi pengelolaan keuangan daerah terhadap pembangunan lokal dan kesejahteraan masyarakat. *Pendekar: Jurnal Pendidikan Berkarakter*, 2(5), 29–38. <https://doi.org/10.51903/pendekar.v2i5.504>
- Subang, K. P. K. (2020). Pengetahuan keuangan dan love of money: Pengaruhnya terhadap pengelolaan keuangan pribadi dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Cihambulu. *Jurnal SEKURITAS (Saham, Ekonomi, Keuangan dan Investasi)*, 4(1), 43–54. <https://doi.org/10.32493/skt.v4i1.6335>
- Sudaryo, Y., Sjarif, D., & Sofiati, N. A. (2021). *Keuangan di era otonomi daerah*. Penerbit Andi. <https://books.google.com/books?id=dHI9DwAAQBAJ>
- Suparji, S. (2019). Implementasi prinsip good governance dalam sistem pengelolaan keuangan daerah di Indonesia. *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 4(1), 1–5. <https://doi.org/10.36722/jmih.v4i1.756>
- Sutrisna, W., & Setiawati, N. P. A. (2023). Implementasi prinsip-prinsip good governance pada pemerintahan daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. *Jurnal Ilmiah Cakrawarti*, 6(2). <https://doi.org/10.47532/jic.v6i2.902>
- Swandewi, A. A. I. A. (2014). Pengaruh dana perimbangan dan kemandirian keuangan daerah terhadap keserasian anggaran dan kesejahteraan masyarakat pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 3(7), 356–376. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/EEB/article/view/8217>
- Trianto, A. (2016). Analisis efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah di Kota Palembang. *Akuisisi: Jurnal Akuntansi*, 12(1). <https://doi.org/10.24127/akuisisi.v12i1.92.g67>